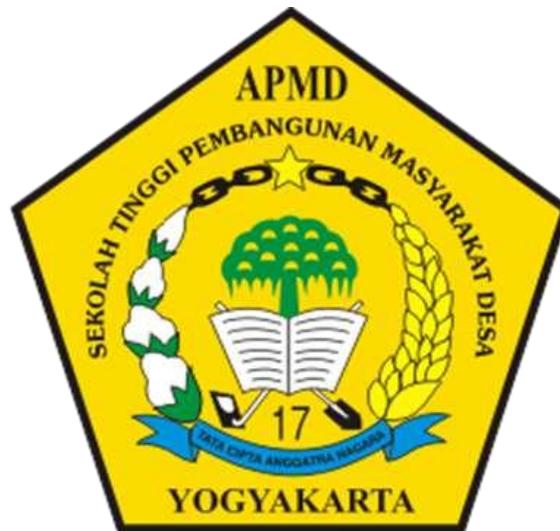


SKRIPSI

**SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN
ORGANISASI AGRA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TANI**

Di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta



**DISUSUN OLEH:
WORILI H. KADAOLOR
18520199**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM S 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL

**SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN ORGANISASI AGRA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI**

Di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata – 1**

**Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa**

“APMD”

Disusun Oleh :

Worili H. Kadalolor

18520199

YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN

MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

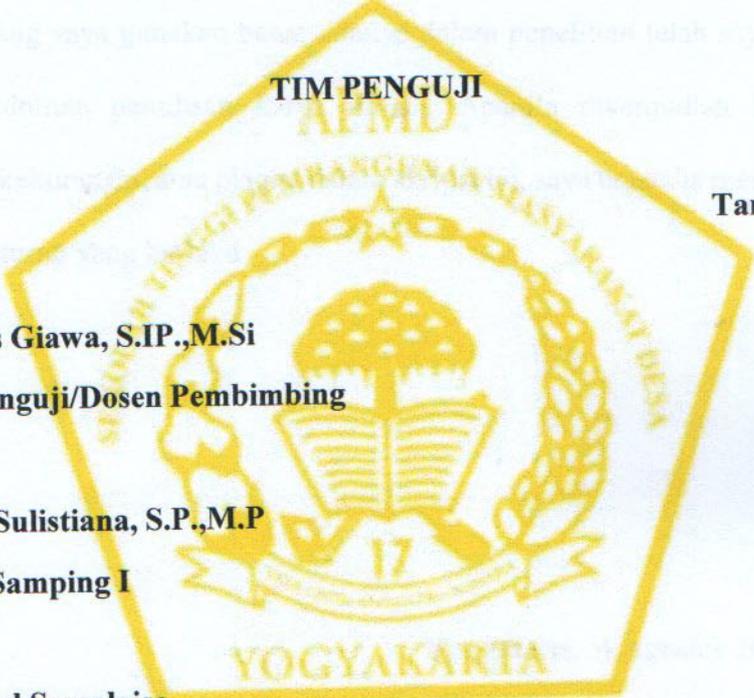
2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 4 Agustus
Waktu : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”

Nama	TIM PENGUJI	Tanda Tangan
1. Analius Giawa, S.IP.,M.Si Ketua Penguji/Dosen Pembimbing		
2. Utami Sulistiana, S.P.,M.P Penguji Samping I		
3. Dr. Rijel Samaloisa Penguji Samping II		

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Sinergitas Pemerintah Kalurahan Dan Organisasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah karya tulis yang saya buat sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan benar adanya dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Yang

Worli H. Kadari

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga dengan kasih setianya tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul; “Sinergitas Pemerintah Kalurahan Dan Organisasi AGRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh gelar sarjana ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Tidak ada jalan yang tak berlubang penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik dikemudian hari.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tanpa bantuan dari pihak lain maka tidak akan berjalan dengan baik. bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh banyak pihak berupa bimbingan, saran, nasehat, serta dukungan moril maupun material sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa,S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan pengarahan dan

bimbingannya dalam penulisan skripsi ini disela-sela kesibukannya sebagai dosen sekaligus ayah rumahtangga.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Kalurahan Ngléri, Kaponeon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Kalurahan Ngléri, Organisasi Tani AGRA Kalurahan Ngléri, seluruh warga masyarakat Kalurahan Ngléri. Terkhusus Ibu Mariati yang sudah menerima kehadiran saya dengan tangan terbuka memberi makan, minum, tempat untuk beristirahat dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Dengan hati yang tulus dan ikhlas semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua Amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Akhir kata, besar harapan penulis agar karya kecil ini dapat berguna bagi pembaca, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam hasil penelitian ini.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan

Worili H. Kadalolor

MOTO

**“Dibidang Ilmu Tidak Ada Jalan Raya Hanya Mereka Yang Tak Gentar Akan
Pendakian Jalan Curam Yang Melelahkan Itu Yang Mempunyai Harapan Untuk
Mencapai Puncak-Puncak Kecerahan”**

(London, Karl Marx 18 Maret 1872)

“Pelaut Yang Handal Tidak Lahir Dari Laut Yang Tenang, Badai adalah Guru”

(Nelayan)

**“Air itu cair, lunak, dan menghasilkan. Tapi, air akan mengikis batuan, yang kaku dan
tidak bisa menyerah. Biasanya, apa pun yang cair, lunak, dan menghasilkan, akan
mengatasi apa pun yang kaku dan keras. Ini adalah paradoks lain: apa yang lembut itu
kuat. Jadilah Seperti Air”**

(Tao Te Ching, Lao Tzu)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Leluhur tempat saya berasal Kabupaten Kepulauan Aru untuk Datuk-Datuk Ursia-Urlima dari Gudorjurin Sampai Jurin Toi-Toi, karena atas ijin dan cinta kasih dari Nya, saya dapat menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan. Dengan ini saya persembahkan karya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayah Karel Kadalolor, dan Ibu Yermia M. Larwuy, terimakasih telah menghadirkan saya di dunia ini, doa yang tidak berkesudahan dan terlebihnya atas pengorbanan secara materi maupun kasih sayang yang tidak pernah pudar. Menjadi bangga bisa memiliki orang tua seperti ayah dan ibu. Maafkan yang saya hasilkan hari ini belum cukup membuat ayah dan bunda bahagia.
2. Saudara Tertua Mario Kadalolor, Kakak Julan P. Kadalolor dan Abner Kadalolor yang tidak henti-hentinya memberi dan menjadi suport sistem yang baik. terimakasih banyak karena telah menjadi Kakak-Kakak yang baik dalam hidup saya.
3. Untuk almarhum Bapak Tua Orias Larwuy terimakasih selama ini telah memberikan landasan berpikir tentang rasionalitas realistik kehidupan.
4. Keluarga besar Marga Kadalolor dan Larwuy yang tidak bisa disebutkan satu persatu. terimakasih selama ini telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan sekaligus keluarga di Yogyakarta yang tidak pernah jenuh dalam memberikan doa, dukungan, motivasi kepada saya, Stendi Garpenasi, Heber Ransismar Batkrombawa, Hira Mustafa, Faris, Ikmal Ali, Adi Bani, Noldi Sarabiti, Frengko, Franiskus Kanda, Fian Bali, Leun, Yulius Servas, Langga, Muis,

Sultan, dan juga semua sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. terimakasih telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga besar Front Perjuangan Rakyat, Bung Momo, Bung Angga, Bung Coro, Bung Oji, Bung Maleo, Bung Panggih Akbar, Bung Cak, Jeng Ana Mariana Ulfa, Jeng Esi, Bung Ranu, Bung Riki. terimakasih selama ini telah menjadi kawan seperjuangan sekaligus mentor dalam berpolitik.
7. Terimakasih kepada Bapak Analius Giawa, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, yang terus membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada almamater Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta, telah menyediakan ilmu pengetahuan dan fasilitas akademik untuk melahirkan Sarjana Rakyat.
9. Terimakasih kepada organisasi, yang sudah menjadi media belajar saya, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (KOMAP), Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Protestan (UKMKP), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Perhimpunan Pelajar Maluku-Maluku Utara (PELA), Ikatan Mahasiswa Aru Yogyakarta (IKAMARU).

INTISARI

Desa Merupakan daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lebih jelas tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, legitimasi keberadaan Desa oleh Negara agar supaya mapan menghadapi perubahan sosial, ekonomi maupun politik, menjadi semangat membangun Desa untuk bangkit mengejar ketertinggalan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semangat demokratisasi level Desa didengungkan semarak pembaharuan, demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga masyarakat dalam pengambilan keputusan publik secara demokratis, hal ini pun berdampak pada keterlibatan kelompok kepentingan untuk mewarnai demokrasi Desa, termasuk kelompok tani atau organisasi tani. Karena kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa tidak lagi bersifat “ayah tahu apa yang baik untuk anaknya” melainkan juga harus berdasar pada prakarsa bersama masyarakat. Dengan tantangan demokratisasi tersebut maka peneliti mengambil topik tentang; Sinergitas Pemerintahan Kalurahan dan Organisasi AGRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Kalurahan Ngléri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan untuk jenis penelitian, peneliti memakai metode deskriptif kualitatif. Yaitu berusaha untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menguraikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan akurat dengan strategi naratif interaktif yakni strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu yang menjadi sasaran informan untuk menceritakan terkait apa yang terjadi di kehidupan mereka utamanya yang berhubungan topik dalam penelitian, setelah itu informasi yang didapat kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif.

Untuk fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah desa dan organisasi tani AGRA dalam memberdayakan masyarakat sektor pertanian, objek penelitian ini ditinjau dari pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan pada masyarakat dan pengembangan pada masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam memberdayakan masyarakat sektor pertanian di Kalurahan Ngléri Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sinergitas antara pemerintah kalurahan Ngléri dengan organisasi tani AGRA Ngléri belum optimal, sehingga model pemberdayaan seperti pelatihan pengembangan sumberdaya petani belum membuahkan hasil, terlihat dari masalah petani yaitu kepemilikan lahan yang timpang, biaya sewa tanah yang relatif tinggi, akses terhadap pasar dan permodalan, kurangnya irigasi, kurangnya benih dan penyesuaian penggunaan alat pertanian yang lamban, belum dapat di selesaikana.

Kata Kunci : Otonomi, Demokrasi, Sinergitas

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Literature Review	7
F. Kerangka Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	26
BAB II PROFIL KALURAHAN NGLERI.....	31
A. Sejarah Kalurahan Ngleri	31
B. Keadaan Geografis Kalurahan Ngleri	33
C. Struktur Pemerintah Kalurahan Ngleri.....	42
D. Data Personil BPKal.....	47
BAB III SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN ORGANISASI AGRA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DI KALURAHAN NGLERI KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	49
A. Sinergitas pemerintah Kalurahan Dengan Organisasi AGRA dalam pemberdayaan masyarakat tani Ngleri.	49

B. Hubungan Kemitraan Pemerintah Kalurahan Dan Organisasi Tani AGRA Untuk Kepentingan Pemberdayaan Masyarakat Tani.	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
PANDUAN WAWANCARA.....	75
DAFTAR PERTANYAAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
Jurnal.....	77
Buku	78
LAMPIRAN.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Merupakan daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peluang bagi setiap daerah untuk berkreasi mengembangkan kemandirian dalam mengelola daerahnya. Hal ini juga tercantum dengan jelas dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa semangat membangun Desa untuk bangkit mengejar ketertinggalan pembangunan sudah dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pemberian kesempatan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan juga untuk desa sekaligus memberikan pemaknaan bahwa desa bukan hanya sebagai wilayah administratif, melainkan juga merupakan sebuah daerah yang istimewa dan memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Semangat demokratisasi Desa, dalam Undang-Undang terdahulu sampai pada UU No. 6 Tahun 2014 adalah suatu rangkaian upaya meningkatkan peranan pemerintah pada wilayah-Desa agar hadir di tengah-tengah masyarakat, berupaya untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat Desa, melalui kebijakan penguatan Desa, memunculkan optimisme pembangunan Desa, legitimasi keberadaan Desa agar supaya mapan menghadapi perubahan sosial, ekonomi maupun politik.

Bunyi pasal-pasal yang ada diharapkan bisa menggerakkan semua lapisan masyarakat Desa untuk bisa mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa semangat demokratisasi level Desa didengungkan semarak pembaharuan, demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga masyarakat (partisipasi) dalam pengambilan keputusan publik, keterlibatan kelompok kepentingan mewarnai demokrasi Desa, termasuk kelompok tani atau organisasi tani. Masyarakat sektor pertanian sebagai profesi mayoritas pedesaan dengan organisasi maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi salah satu kelompok kepentingan yang mana keanggotaannya terdiri dari masyarakat desa setempat tentulah memiliki hak untuk ikut terlibat dalam perencanaan kebijakan pemerintah Desa. Dengan sumber daya alam yang dimiliki serta dukungan dalam bentuk regulasi dan finansial oleh pemerintah pusat Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa harus digunakan untuk membiayai berjalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Bagaimana Desa mendayagunakan setiap peluang dan bagaimana Desa mengatasi setiap tantangan dalam proses pelaksanaan kewenangan yang telah didesentralisasikan, otonom, demokratisasi tersebut harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang siap dan tangguh untuk membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu maka sejatinya Desa dapat mandiri dan berdaulat setelah kemampuan pemerintah Desa menjalankan tugas pokok, wewenang dan fungsinya berjalan dengan baik, serta bagaimana sinergi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Salah satu kewenangan pemerintah Desa adalah pemberdayaan. Berbicara mengenai pemberdayaan maka masyarakat Desa adalah sasaran namun tidaklah hanya menjadikan masyarakat sebagai objek semata, pola sinergitas antara masyarakat dan pemerintah Desa

tercantum menjadi hubungan kemitraan dengan tujuan menjadikan manusia dan organisasi di pedesaan menjadi objek sekaligus sebagai subjek pembangunan pedesaan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tentu langkah pemberdayaan harus dilakukan dengan baik agar berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat, dimensi individu maupun kelompok masyarakat yang merupakan pendukung utama tata pemerintahan Desa harus diberdayakan. Karena kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa tidak lagi bersifat “ayah tahu apa yang baik untuk anaknya” melainkan juga harus berdasar pada prakarsa masyarakat. Idealnya masyarakat harus berperan aktif untuk perkembangan Desa intervensi apa yang harus diputuskan menjadi kebijakan Desa, terlibat menjalankan program-program pemerintah Desa, mengawasi pelaksanaan program, dan menilai keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan program tersebut, karena dalam hal ini masyarakat bukan hanya menjadi objek tetapi juga subjek. Perumusan program pemberdayaan masyarakat desa harus menggunakan metode bottom up karena hakikatnya pemberdayaan masyarakat dilakukan agar membuat masyarakat lebih berdaya. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menunjang kestabilan ekonomi dan sosial di tingkat Desa. Tantangan kemandirian Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat harus dijawab oleh desa dengan berinovasi, pemberdayaan di tingkat desa dapat dilakukan dengan melihat peluang atau potensi desa yang mungkin belum tergarap dengan baik. Namun terlebih dahulu para aktor yang terdiri dari semua elemen masyarakat terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara alamiah untuk mengembangkan potensi desa dengan tujuan bersama untuk kesejahteraan.

Berbicara mengenai Desa maka penting untuk melihat pekerjaan mayoritas masyarakat Desa, sampai hari ini pertanian merupakan salah satu sumber mata pencaharian mayoritas rakyat Indonesia. Angkatan kerja di Indonesia utamanya yang bermukim di pedesaan mayoritas berprofesi sebagai petani, pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak

dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dapat menjadi fokus pemerintah Desa agar supaya sumber daya pertanian yang ada dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menghasilkan nilai lebih dari hasil produksi petani. Masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Tani (OT) sebagai organisasi penghimpun masyarakat sektor pertanian, organisasi harus mampu merumuskan secara objektif kebutuhan dan keperluan masyarakat tani kemudian berperan secara aktif untuk mengakses informasi (transparan) pemerintah Desa utamanya mengenai pos Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran sebelumnya, serta dapat memanfaatkan posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana secara keanggotaan terdiri dari representasi kelompok kepentingan di Desa, secara fungsi ada tiga fungsi utama yang dimiliki BPD (1) membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintah Desa, dapat di maksimalkan perannya oleh organisasi tani untuk kepentingan petani. Ruang-ruang demokratis seperti musyawarah tingkat Rukun Tetangga (RT) tingkat Rukun Warga (RW) Dusun (musdus) musyawarah tingkat Desa (musdes) kiranya dimanfaatkan dengan baik oleh Organisasi Tani agar supaya aspirasi masyarakat pertanian dapat dijadikan sebagai program kerja pemerintah Desa.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan sudah memiliki perkumpulan dalam bentuk organisasi pertanian dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai payung. Hal ini menegaskan bahwa pengorganisasian terhadap masyarakat tani merupakan hal yang penting dalam memajukan sektor pertanian di desa. Dengan adanya Organisasi Tani dapat dilihat bahwa kepedulian masyarakat berpartisipasi untuk meningkatkan kemandirian produksi serta kemandirian ekonomi rumah tangga memiliki progress, namun belum signifikan. Kita dapat melihat fakta bahwa sampai hari ini para petani masih menjadi penyumbang terbesar rumah tangga miskin, dengan persentase penduduk

miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022 berada pada presentase 9,54 persen. Artinya jumlah masyarakat miskin diseluruh Indonesia adalah 26,16 Juta jiwa. Mirisnya dalam laporan BPS mencatat lebih dari setengah persen rumah tangga miskin yaitu 51,33% menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Persoalan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia berada pada perbandingan 0,68% yang artinya 1% penduduk menguasai 68% tanah. Dalam rangka menunjang petani dengan pertaniannya, tanah merupakan faktor penting. Tanah merupakan aset mendasar untuk keberlanjutan sosial, politik, dan ekonomi. Tanah sebagai alat untuk sumber mata pencaharian dan mengumpulkan kekayaan bagi masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Singkatnya, tanah merupakan bagian integral dari pembagunan pertanian. Artinya, tanah merupakan modal utama untuk bertani, dengan demikian, penguasaan tanah yang tidak merata dapat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan monopoli pendapatan oleh pemilik lahan luas dengan kata lain berdaya dan tidaknya petani Indonesia dapat dilihat dari akses petani terhadap tanah. Sayangnya, akses terhadap tanah sebagai modal utama untuk bertani tidak selalu diperoleh dengan mudah, ditambah dengan permasalahan harga jual yang anjlok, untuk jenis komoditas pertanian hortikultura mewarnai carut marut permasalahan petani Indonesia, atasadasar masalah tersebut kemudian menjadikan petani semakin bangkrut ditengah biaya produksi yang tidak sebanding dengan rendahnya harga jual sehingga pada akhirnya menjadi sasaran empuk tengkulak.

Khusus di pulau Jawa, pertanian didominasi petani skala kecil dengan status bagi hasil. Sementara itu, kosentrasi kepemilikan tanah berada pada segilintir orang di desa. Banyak studi menunjukkan takdir pahit ini. Khusus di kalurahan Ngleri, Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan permasalahan petani di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul bahwa para petani memanfaatkan lahan dengan luas tidak seberapa, mereka dihadapkan pada penyewaan pertahun, serta banyaknya buruh tani mengabdikan tenaganya untuk menggarap lahan milik Perusahaan Hutan Nasional Indonesia (Perhutani),

penyaluran bantuan pupuk dan bibit dengan sarana-prasarana produksi pertanian (Samprotan) bersubsidi dari dinas pertanian yang dipangkas dan diuangkan oleh pihak Gapoktan. Petani di Kalurahan Ngleri telah memiliki wadah untuk penyaluran aspirasi melalui organisasi tani, namun fenomena yang nampak adalah wadah yang menjadi payung organisasi tani yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) belum cukup efektif untuk menjawab masalah pertanian baik akses terhadap tanah, sarana-prasarana produksi pertanian, maupun akses terhadap pasar, adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan dinas pertanian belum mampu menjawab permasalahan petani.

Sebagaimana telah disinggung pada halaman sebelumnya bahwa Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan di wilayahnya yang mana terdapat masyarakat sektor pertanian sebagai profesi mayoritas, tentunya tantangan keterbatasan lahan, akses modal pertanian, pemangkasan serta kapitalisasi sarana dan pra sarana produksi pertanian (Samprotan), sosialisasi serta pelatihan untuk pemberdayaan agar dapat mengakses pasar potensial ini harus di jawab. Sejauh mana sinergitas pemerintah Kalurahan, serta kelompok kepentingan seperti masyarakat tani dalam Organisasi Tani menjadi titik sentral untuk mengetahui bagaimana sinergitas pemerintah Kalurahan, dan organisasi tani menjawab permasalahan yang dihadapi petani di kalurahan Ngleri. Berangkat dari uraian latar belakang masalah ini maka topik yang peneliti ambil adalah; Sinergitas Pemerintahan Kalurahan dan Organisasi AGRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

1. Sinergitas pemerintah Kalurahan dengan Organisasi AGRA dalam pemberdayaan masyarakat tani Ngleri.
2. Hubungan kemitraan pemerintah Kalurahan dan Organisasi AGRA untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat sektor pertanian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan dalam Latar Belakang di atas maka Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: bagaimana Sinergitas Pemerintah Kalurahan dan Organisasi AGRA dalam pemberdayaan masyarakat tani di Kalurahan Ngelri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Sinergitas dari pemerintah Kalurahan dan Organisasi AGRA dalam pemberdayaan masyarakat tani di Kalurahan Ngelri, Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Literature Review

Pada literatur review penulis akan menggambarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sinergitas Pemerintah Kalurahan, dan Organisasi Tani Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertanian.

1. Penelitian pertama adalah (Khaerunnisa) berjudul (Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone) karya Khaerunnisa ini menjelaskan bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta tata pemerataan

pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan kesenjangan sosial antar masyarakat dapat teratasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan legitimasi untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai dengan Undang-Undang Desa pasal 72, desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan pendapatan berupa transfer Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peran besar yang sudah diterima oleh desa harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan tentang lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pemerintah menjadi landasan untuk perencanaan penganggaran dilakukan oleh pemerintah desa serta dalam jurnal ini dijelaskan metode dalam hal keuangan desa, seperti pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang

representatif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi.

2. Penelitian berikutnya dilakukan Oleh Dosen Faperta UMSB Wedy Nasrul (Tentang Pembangunan Perlembagaan Pertanian Untuk Meningkatkan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian Tahun 2012).

Untuk keberhasilannya diperlukan kerja sama antara: administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerja sama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992). Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan (Elizabeth, 2007a):

- a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (*voluntary sector*).
- b. Kelembagaan pasar (*private sector*) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
- c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan tersebut perlu mereformasi kan diri dan bersinergi agar sesuai dengan kebutuhan yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan sebagai upaya pemberdayaan, yang dilakukan tidak hanya secara internal, namun juga tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut. Di sisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar

berorientasi pada: a). Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan, b). Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, c). Win-win mutualy dengan kemitraan yang kolehial, d). Tercipta interdependensi hulu-hilir, e). Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), f). Koperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis, g). Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta h). Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007b).

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Alter Maykel Ruru Dkk dengan judul (Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat) Hasil penelitian menerangkan bahwa strategi pengembangan desa berperan penting untuk pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah maka pengembangan ekonomi meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di segala bidang. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maka sinergitas antar lembaga sangat dibutuhkan upaya pemberdayaan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal , yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan berikutnya akses terhadap permintaan.

4. Penelitian berikutnya berjudul (Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Jurnal Ilmu Pemerintahan 2017 penelitian yang dilakukan oleh K.Kushandajani ini menjelaskan bahwa Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak pada kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, program-program dibuat secara sentralistis oleh pemerintah pusat tanpa menimbang secara sistemik kebutuhan esensial masyarakat. Padahal seharusnya suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini disusun dalam rangka memberi jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan peneliti serta menjadi acuan dalam melakukan studi di lapangan. Bagian pertama peneliti akan melakukan tinjauan pustaka terhadap studi-studi sinergitas, pemberdayaan masyarakat sektor pertanian oleh pemerintah Kalurahan dan organisasi pertanian. Dengan tujuan untuk menerangkan bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah Kalurahan dengan Organisasi Pertanian untuk mewartahi kepentingan masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat utamanya sektor pertanian.

1. Sinergitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Sinergi yaitu kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Tujuan sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok untuk saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. Sinergi juga adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih baik daripada jumlah bagian per bagian. Adapun konsep ber-sinergi diantaranya menurut Najiyati dan Rahmat (2011) adalah sebagai berikut: a. Berorientasi pada hasil dan positif. b. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma c. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan. d. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses. Maka dalam konteks ini pemerintah Kalurahan sebagai pemangku kepentingan memiliki otoritas untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat setor pertanian atau proteksi kebijakan untuk menjamah kepentingan sektor pertanian, namun dengan berbagai otonomi terbatas tugas dan kewenangan yang sudah di amanatkan dalam UU

No. 6 Tahun 2014 pentingnya pemerintah desa berkolaborasi atau bermitra dengan kelompok kepentingan dalam hal ini organisasi pertanian yang mana lebih terfokus fungsi dan tugas pada masyarakat sektor pertanian.

2. Koordinasi

Dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan informasi melalui komunikasi atau berkoordinasi. Elemen komunikasi yang ada dalam sinergitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005, h.18). Silalahi (2011, h 217), “Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam suatu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama”. Moekijat (1994, h.39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1) Hubungan langsung Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- 4) Dinamisme Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- 5) Tujuan yang jelas Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6) Organisasi yang sederhana Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8) Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif Kepemimpinan

yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

3. Pemerintah Desa Sebagai Pelayan Masyarakat

Pemerintahan di tingkat desa merupakan salah satu bentuk negara hadir untuk melayani warganya. Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa menyediakan pelayanan kepada Masyarakat serta menyejahterakan masyarakat desanya. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi, yakni terpenuhi hak-haknya sebagai warga masyarakat; yaitu bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi serta mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Pemerintah Desa. Hal ini sangat berkaitan erat dengan peran Pemerintah Desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat desa. Dalam kinerjanya, Pemerintah Desa harus menjalankan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan pelayanan di desa mengalami peningkatan dan juga dapat menyejahterakan masyarakatnya. Istanto (dalam Diana Firiana, 2019: 18) mendefinisikan konsep pemerintahan adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara, selanjutnya Labolo (dalam Diana Fitriana, 2019: 18) mengungkapkan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana Masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. (Dalam Wastiono Tahir, 2019:18) juga mendefinisikan desa adalah suatu kesatuan Masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama

memiliki kepentingan politik ekonomi, sosial dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih secara bersama. Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Seperti yang dikatakan Widjaja (dalam Diana Firiana, 2019:18) Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagian perwujudan demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa. Desa dibentuk lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

- e. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- f. Berdasarkan hak asal usul yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warga.
- g. Dengan upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada dalam daerah kabupaten dan/atau kota. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain menundukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan kepada masyarakat. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dukuh, kepala urusan dan kepala seksi yang bertugas membantu kepala desa menjalankan visi dan misi atau tujuannya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Pemerintah desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu

menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik. Penerapan pasca diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan ke arah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:

- 1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari,
- 2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru. Misalnya dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan desa bersama dengan kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan,
- 3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan, artinya proses politik pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijakan Pemerintah pusat secara terpusat (sentralistik), melainkan berasal dari partisipasi Masyarakat. (Solekhan, 2014:16). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (dalam Maria, 2005:23). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada

desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain pemerintah desa, terdapat pula BPD yang dimana fungsinya adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini dapat disimpulkan bahwa BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pembangunan desa. Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan musyawarah desa atau musdes pada agenda yang mengharuskan adanya musdes, salah satu contohnya adalah rencana pendirian BUMDesa. Tanpa persetujuan BPD, BUMDesa tidak bisa didirikan. Dari pengertian di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Berdasarkan kerangka konseptual di atas sehingga penulis menyimpulkan pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka urusan pemberdayaan masyarakat sektor pertanian berorientasi menyelesaikan permasalahan scup desa masuk ke dalam penyelenggaraan urusan pemerintah desa.

4. Politik Organisasi Pertanian

Organisasi pertanian yang menghimpun masyarakat sektor pertanian dapat kita lihat dalam ragam bentuk organisasi bernuansa politik, mengapa penting organisasi pertanian bercorak politik adalah bahwa masyarakat sektor pertanian mengalami kekhususan karena sejak dahulu sampai berganti era menjadi reformasi dewasa ini, sektor pertanian masih menjadi penyumbang rumah tangga miskin yang terbesar di seluruh Indonesia, begitu miris apabila kita melihat fakta bahwasanya Indonesia adalah negara agraris dengan iklim yang stabil dan cukup untuk dijadikan sebagai negara pengekspor pangan dunia, serta dapat mengangkat pendapatan rumah tangga dari sektor ini. Tentang organisasi pertanian sebagai wadah politik petani adalah konsep yang sudah ada dan sudah dipraktikkan oleh partai-partai politik sebagai organisasi sayap sejak era orde lama sampai era reformasi, di era orde lama Organisasi Pertanian bernama Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia memiliki anggaran dasar-anggaran rumah tangga, serta metode untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat petani sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki oleh organisasi untuk memperjuangkan masyarakat sektor pertanian keluar dari pengisapan dan penindasan feodal. Selain BTI, era reformasi kita mengenal Gerakan Nasional Tani Indonesia (GANTI) sebagai Organisasi Sayap Partai PDIP yang bergerak di sektor pertanian dan nelayan, metode organisasinya adalah memiliki kemiripan yaitu politik integrasi. Kerja organisasi bersinergi menjadi metode dalam melihat adanya kepentingan yang harus diperjuangkan. Dalam konteks ini adalah masyarakat sektor pertanian Ngléri harus terintegrasi dengan pemerintah desa, agar supaya kepentingan pemberdayaan yang menjadi salah satu semangat pemerintah desa dapat dijalankan serta kepentingan masyarakat sektor pertanian Ngléri dapat diasosiasikan sebagai kebutuhan yang akan dijawab bersama melalui sinergitas

pemerintah desa dengan organisasi pertanian untuk kebaikan bersama masyarakat desa dalam hal ini masyarakat sektor pertanian.

5. Akses Terhadap Tanah

Akses (access) berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Akses masyarakat terhadap pelayanan publik termasuk dalam rubrik ini. Ada dua hal penting yang terkandung dalam akses yaitu keterlibatan secara terbuka dan keikutsertaan. Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekanannya. Keterlibatan secara terbuka menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, rakyat miskin dan kaum marginal lainnya. Akses akan menjadi arena titik temu antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang akses warga dan memberikan layanan publik pada masyarakat dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Sebaliknya, masyarakat secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi problem, kebutuhan, dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah, dan pengembangan potensi secara sistematis (Sutoro Eko, 2004: 222).

Akses tidak hanya dipahami sebagai hubungan kepemilikan tetapi juga menyangkut siapa yang sebenarnya yang menguasai dan menikmati keuntungan dari sumber daya serta dinamika proses yang memungkinkan hal itu terjadi (Peluso dan Ribot, 2003). Dalam hal ini, akses atas tanah merupakan suatu kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari tanah, dengan segala relasi sosial yang menyertainya.

Akses atas tanah mempunyai kaitan erat dengan dua klasifikasi reforma agraria yaitu reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan

peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Singkatnya, reforma aset berhubungan erat dengan legalisasi aset.

Legalisasi aset adalah proses dari administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, yakni pengumpulan data fisik, data yuridis serta penetapan atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Di mana tanah milik yang sudah bersertifikat maka akan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat terutama untuk modal usaha, sehingga kontribusinya nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Legalisasi aset dapat bertujuan sebagai penguatan keamanan teritorial dan kesejahteraan terdiri dari pemegang hak yang justru dapat memfasilitasi proses pelepasan atas tanah, jika tanpa didahului kebijakan redistribusi yang bertujuan menata kembali diferensiasi agraris.

Legalisasi aset juga menguatkan klaim atas tanah dan pemusatan tanah pada segelintir orang atau negara, ketika pemerintah melakukan tanpa mempertimbangkan kebijakan redistribusi yang bertujuan menata kembali diferensiasi agraris yang ada. Dengan kalimat lain, legalisasi aset tanpa land reform yang berciri redistributif, hanya akan memberi pelayanan kepada mereka “yang memiliki tanah” dan bukan pada mereka “yang tidak memiliki tanah”. Dalam perspektif lebih luas, jika struktur ekonomi suatu negara tidak kondusif bagi ekonomi masyarakat biasa yang memiliki sedikit tanah, maka sertifikat yang dimilikinya akan cenderung mudah terlepas dengan dijadikannya agunan kredit tatkala mereka membutuhkan “dana segar” guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Herrayani, Soraya, dan Moechtar, 2019: 290).

Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai

sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Budimanta, 2018: 38).

Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria khususnya Pasal 1 yang menyebutkan bahwa penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.

Masyarakat sebagai penerima obyek dari reforma agraria akan diberikan lahan dengan cara redistribusi tanah. Masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk usahanya hanya sebagai pekerja lahan yang diolah kini dapat memiliki lahan yang kemudian akan dibuka aksesnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dari lahan yang dimilikinya. Namun, terkait kebijakan redistribusi tanah ini, Didik J. Rachbini dan Andi Mattalata menyebutkan bahwa tidak selalu dalam bentuk gratis, sebab masyarakat yang memperoleh tanah dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah harga tertentu, yang pembayarannya dilakukan setelah pengelolaan tanah tersebut mendatangkan hasil.

Dengan mengikuti logika di atas, maka reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati. Reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep land reform yang dilengkapi dengan konsep acces reform dan regulation reform. Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke kredit, penyuluhan pedesaan, dan layanan lainnya. Acces reform pada konteks ini dititikberatkan pada pemberian

kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia.

Penguasaan dan pengusahaan tanah objek reforma agraria kepada masyarakat dapat diselenggarakan melalui tiga alternatif sub model, yakni: penguasaan secara perorangan, penguasaan secara bersama, atau penguasaan melalui badan usaha atau koperasi. Apabila membentuk kelompok tani, maka diperlukan penggabungan tanah untuk kegiatan tertentu. selanjutnya kelompok tani tersebut dapat bersama pemerintah (dalam hal ini pemerintah desa/BUMDes maupun pemerintah daerah/BUMD) dan badan usaha lainnya/penanam modal untuk membentuk badan usaha patungan.

Acces Reform berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi petani, perbankan (kredit). Menurut Winoto (2009), *acces reform* atau penataan akses adalah upaya pembangunan yang lebih luas yang melibatkan multi pihak untuk menjamin agar aset tanah yang diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Pengertian lebih sederhananya adalah berdasarkan Perpres Nomor 86 tahun 2018, yang menjelaskan bahwa penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

6. Petani

Banyak kalangan akademis sosial memberikan pengertian dan definisi yang beragam akan istilah “petani”. Meskipun demikian, secara umum, petani dipahami sebagai seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Wolf sebagaimana dikutip Teodor Shanin

(1985:49) memberikan istilah peasant untuk petani yang bercirikan penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruangan-ruangan tertutup (greenhouse) di tengah kota atau di dalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga di daerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian. Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan.

Mosher (1987:198) memberi batasan bahwa petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Sedangkan menurut Rodjak (2006:11) petani merupakan unsur usaha tani yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani.

Petani sering digambarkan sebagai individu yang bekerja di sektor pertanian, penghasilannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Pemberdayaan para petani ini cukup rumit, hal ini didasarkan pada karakteristik petani yang kompleks (Anwas, 2014:127). Petani merupakan penduduk atau orang-orang yang sementara atau secara tetap memiliki dan atau menguasai sebidang “tanah pertanian” dan mengerjakannya sendiri, baik dengan tenaganya sendiri (beserta keluarganya) maupun dengan menggunakan tenaga orang lain atau orang upahan: Termasuk dalam pengertian “menguasai” di sini adalah menyewa, menggarap (penyakap), memaro (bagi-hasil). Sedang buruh-tani tak bertanah tidak termasuk dalam kategori petani.

Orang yang disebut petani, atau kedudukannya sebagai petani, mempunyai fungsi yang banyak. Petani sebagai orang yang berusaha tani, mendapatkan produksi pertanian dalam arti luas, karenanya petani tidak akan terlepas dari ternak, ikan dan tanaman dimanapun tumbuhnya. Dalam melakukan usahanya para petani cenderung membuat suatu kelompok tani yang beranggotakan para petani-petani (pemilik lahan, buruh tani, peternak, nelayan) dalam satu desa. Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) maupun petani-taruna (pemuda-pemudi), yang terikat informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kontak tani (Ketua Kelompok Tani).

Petani dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya yaitu petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadai dan petani sebagai buruh tani. Menurut Oertiwi (dalam Firmansyah, 2014: 5-6) secara umum petani dibedakan menjadi beberapa, yaitu petani pemilik lahan, petani penyewa lahan, petani penggarap, dan buruh tani.

- a. Petani pemilik lahan adalah petani yang mempunyai lahan sendiri dan bertanggungjawab atas lahan nya. Sehingga petani pemilik lahan mempunyai hak atas lahan nya untuk memanfaatkan lahan nya seperti penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang dilakukan sendiri.
- b. Petani penyewa adalah petani yang menyewa tanah orang lain untuk kegiatan pertanian. Besarnya biaya sewa tergantung pemilik tanah yang menentukan besarnya biaya sewa.
- c. Petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain untuk dengan system bagi hasil. Resiko usaha tani yang ditanggung Bersama dengan pemilik

lahan dan penggarap dalam system bagi hasil. Besarnya bagi hasil tidak sama tergantung daerah masing-masing.

- d. Buruh tani adalah petani yang menggarap atau orang yang bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya tergantung pada pemilik lahan yang memperkerjakannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu langkah untuk menjawab, mengembangkan dan menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah. Dalam suatu penelitian selalu menggunakan metode yang digunakan secara menyeluruh untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat ataupun mendekati kebenaran objektif sehingga hasil penelitian dapat dikatakan ilmiah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni berusaha untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan akurat dengan strategi naratif yakni strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu yang menjadi sasaran informan untuk menceritakan terkait apa yang terjadi di kehidupan mereka utamanya yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian, informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Di akhir tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan pandangan yang disampaikan oleh informan yang akan dipandu dengan kerangka konsep.

2. Objek Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka peneliti berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah desa dan organisasi pertanian dalam memberdayakan masyarakat sektor pertanian, objek penelitian ini ditinjau dari pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan pada masyarakat dan pengembangan pada masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam memberdayakan masyarakat sektor pertanian di Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah informan atau informan yang dapat menerangkan mengenai situasi dan kondisi sesuai latar permasalahan penelitian. Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan) informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian yang dilakukan di Kalurahan Ngleri mengenai Sinergitas Pemerintah Kalurahan Dan Organisasi AGRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Ngleri ini melibatkan beberapa informan yang berpengaruh dalam penyusunan analisis penelitian. Informan tersebut di antaranya:

Tabel 1.1
Identitas Informan

No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan Terakhir
1	Supardal	Lurah	L	S1
2	Yuli Suprianto	Carik	L	S1
3	Endri Pratiwi	Dukuh Ngleri Lor	P	SMK
4	Mohsym	Wakil Ketua BPKal	L	SMK
5	Mariati	Ketua Kelompok Tani	P	SD

6	Nofi	Warga Kalurahan	P	SD
7	Tiwi	Warga Kalurahan	P	SMP
8	Adi Sumarto	Warga Kalurahan	L	SMA
9	Suwardi	Ulu-Ulu	L	SMK
10	Asmadi	Ketua Gapoktan	L	SMK

Sumber: Data Peneliti di Kalurahan Ngléri 2023

Dari hasil investigasi peneliti mencari informan yang dapat dipercaya dan juga berkompeten untuk menjelaskan seluk beluk permasalahan masyarakat sektor pertanian. Dan peneliti menemukan informan yang terdiri dari, Lurah, Carik, Ulu-Ulu, Dukuh, Wakil Ketua BPKal, Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, dan unsur masyarakat Kalurahan Ngléri. Hasil dari investigasi dan penelitian lapangan menemukan informan berdasar usia matang mulai dari termuda yaitu Suwardi sebagai kasi kesejahteraan dengan umur 28 tahun sedangkan usia tertua adalah Bapak Supardal selaku Lurah Ngléri berumur 67 tahun, dengan asumsi usia 28 sampai 67 tahun merupakan usia yang sudah matang sehingga informasi yang disampaikan berpengaruh terhadap hasil. Dari segi jender informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari informan perempuan. Terlihat dari tabel diatas juga menunjukan mayoritas informan lulusan SLTA/SMK. Informan terdiri dari pertama Lurah Kalurahan Ngléri selaku pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan Kalurahan, informan kedua adalah perangkat Kalurahan Ngléri yaitu Carik Kalurahan dan Kepala Dukuh sebagai pembantu kepala Kalurahan dalam menjalankan setiap program, Ulu-Ulu sebagai pembantu urusan lurah mengenai pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Informan yang ketiga adalah ketua Gapoktan dan serta kelompok tani, dan informan keempat yaitu unsur masyarakat sektor pertanian. Hal ini penting bagi peneliti untuk mengetahui sinergitas pemerintah Kalurahan dan organisasi tani dalam memberdayakan masyarakat sektor pertanian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui: Pertama observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap objek penelitian di tempat berlanjungnya suatu peristiwa (lapangan). Kedua wawancara, sebagai proses komunikasi interaksi antara peneliti dengan subjek (informan/narasumber) penelitian untuk mengali atau menguraikan tentang objek (permasalahan) yang diteliti menggunakan langsung ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara. Ketiga dokumentasi, atau pengumpulan data secara tertulis atau catatan baik dokumen khusus mengenai RPJM Desa yang memuat profil dan lain-lain, surat atau berita keterangan mengenai penyelenggaraan desa, seperti foto, rekaman suara.

5. Teknik Analisis Data

Sedangkan teknik analisis data yaitu data yang telah terkumpul dari hasil Observasi dan wawancara dengan informan di lapangan dan kemudian studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara. Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi suatu yang dapat dikelola, mengsystemikan, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memfokuskan apa yang diceritakan orang lain. Beberapa tahap yang akan dilakukan untuk menganalisis data antara lain pertama, saya mengumpulkan data (data collection) pengumpulan data dilakukan melalui hasil-hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkumpul mulai dari proses pelaksanaan penelitian. Kedua reduksi data, (data reduction) digunakan untuk analisis yang menajamkan menggolongkan

mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil agar peneliti lebih mudah menganalisis data tersebut yakni secara khusus penulis mereduksi pada pola penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam urusan pemberdayaan sehingga muncul permasalahan masyarakat sektor pertanian. Ketiga, penyajian data (data display) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan) sehingga dalam penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Dan yang terakhir adalah keempat, yaitu penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verivcation).

BAB II

PROFIL KALURAHAN NGLERI

A. Sejarah Kalurahan Ngleri

Kalurahan Ngleri adalah salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data yang diterbitkan oleh BPS 2013 Kapanwon Playen Gunungkidul memiliki luas 986,42 m persegi. Dahulu kala, saat Indonesia masih belum merdeka dan masih terdiri dari kerajaan-kerajaan nusantara, ada sebuah perkampungan kecil di perbatasan wilayah Kesultanan Mataram Islam lama yang berpusat di Kota Gedhe dan Kerajaan Majapahit. Perkampungan tersebut adalah sebuah kampung petani yang berada di tengah alas (baca: hutan yang belum terjamah). Rumah di kampung itu kecil-kecil dengan persawahan yang sangat luas. Penduduknya hidup sederhana dan berkecukupan lewat bercocok tanam di sawah mereka.

Suatu hari, datanglah segerombolan orang berpakaian mencolok melewati daerah perkampungan petani tersebut. Konon katanya, serombongan orang itu adalah sekelompok prajurit yang sedang melarikan diri dari musuh, yang kemudian diduga dari sinilah nama Playen berasal. Nama Playen berasal dari kata playon, playu, melayu, yang artinya berlari, melarikan diri.

Serombongan pelarian yang entah datangnya dari mana. Diduga mereka adalah pelarian dari sisa-sisa Kerajaan Majapahit, karena cerita ini mirip dengan cerita mengenai pelarian keturunan Majapahit yang melarikan diri ke Gunungkidul. Seorang dari rombongan itu terluka parah oleh penduduk setempat diminta untuk pergi ke suatu mata air yang berada di wilayah barat alas. Di wilayah barat tersebut, tepatnya di dekat kali Oya terdapat sebuah mata air yang merupakan hulu dari sebuah kali kecil yang kemudian menyatu dengan kali Oya. Penduduk setempat menamakan kali itu sungai Kali Loro. Kali berarti sungai dan loro yang artinya sakti. Penduduk setempat percaya, barang siapa yang minum air dari sumber tersebut,

maka semua penyakitnya akan sembuh. Dipercaya bahwa Sumber mata air yang dapat menyembuhkan segala penyakit itu di jaga oleh seorang Nyai agar tidak sembarangan orang dapat mengambilnya.

Singkat kata, rombongan itu akhirnya mendatangi mata air tersebut dan dicegat oleh si Nyai. Si Nyai menanyakan maksud kedatangan rombongan tersebut. Rombongan itu pun mengutarakan maksudnya. Nyai pun akhirnya menyanggupi dan mengizinkan rombongan menyembuhkan anggota mereka yang terluka dan memperbolehkan anggota lain untuk meminum air di tempat yang dia jaga. Setelah meminum air prajurit yang terluka itu pun sembuh. Karena mereka berhutang budi kepada Nyai, rombongan itu menawarkan untuk membayar Nyai dengan uang emas. Tetapi, si Nyai menolak dan Ia memberikan syarat, bahwa sebelum rombongan itu pergi mereka harus membuat hajatan yang ramai dan mengundang nya.

Rombongan prajurit menyanggupi nya dan kembali ke wilayah perkampungan. Sekembalinya di kampung rombongan prajurit ini membeli semua hasil panen padi yang ada mereka membuat hajatan yang luar biasa mewah semua penduduk kampung itu diundang beserta si Nyai. Konon katanya, hajatan yang sungguh mewah ini baru sekali dilakukan di kampung itu, padi yang dimasak menghasilkan nasi yang begitu banyak, sehingga nasi-nasi itu diletakkan di atas daun-daun pisang yang sangat panjang, cukup banyak untuk orang yang datang. Nasi yang diletakkan di atas daun-daun pisang mirip dengan apa yang orang Jawa lakukan untuk mendinginkan nasi yang baru masak, dalam bahasa Jawa disebut ngelsergo, ngeler-meletakan/meratakan nasi di atas tempat yang lebar agar cepat dingin. Karena dilakukan berulang-ulang, maka ngeler mendapat imbuhan “I”, menjadi Ngleri dari sinilah nama Ngleri berasal.

B. Keadaan Geografis Kalurahan Ngleri

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kalurahan Ngleri terletak Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak tempuh dari Kalurahan Ngleri ke ibu kota kapanewon yaitu 6 km. Jalan provinsi dan kabupaten sudah bagus. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kota 12 km sedangkan jarak dari ibu kota provinsi 40 km.

Adapun batas wilayah Kalurahan Ngleri disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Batas Wilayah Kalurahan Ngleri

No	Wilayah	Batas
1	Sebelah Utara	Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk
2	Sebelah Selatan	Kalurahan Getas, Kapanewon Playen
3	Sebelah Barat	Kalurahan Dilingo
4	Sebelah Timur	Kalurahan Banaran

Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Kalurahan Ngleri Merupakan salah satu dari 13 Kalurahan di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul yang berada di sektor barat. Jarak orbitasi dengan ibukota kecamatan Playen 4 km, sedangkan untuk jarak tempuh dengan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 40 km.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kalurahan Ngleri

No	Wilayah	Ukuran (Ha)	Persentase (%)
1	Ladang	270	27,53
2	Sawah	40.6	4,14
3	Lainnya	669,817	68,31
Total		980.417	100

Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah Kalurahan Ngleri secara keseluruhan 980.4170 Ha yang terdiri dari 40.6 Ha untuk pertanian sawah, ladang 270

Ha, sedangkan 669,817 Ha dipergunakan untuk lainnya. Secara keseluruhan Kalurahan Ngléri terdiri dari 8 padukuhan.

Dari tabel diatas menunjukan sekitar 31,67% dari total luas lahan Kalurahan Ngléri digunakan untuk bidang pertanian yang terdiri dari ladang dan persawahan. Sebab sektor pertanian merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat Kalurahan ngléri dan sektor pertanian memiliki potensi yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat Kalurahan Ngléri. Para petani di Kalurahan Ngléri biasanya memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam beraneka ragam tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah dan tumbuhan kapas.

Hasil pertanian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta untuk diperdagangkan guna menambah pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat menjual hasil pertaniannya di pasar Kalurahan Ngléri dan juga di pasar yang berada di kalurahan tetangga yaitu Kalurahan Banaran. Penjualan hasil pertanian di pasar Kalurahan Ngléri dilandasi oleh alasan terkait akses masyarakat yang mana masyarakat tidak akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk menjangkau pasar kalurahan. Artinya, masyarakat dapat menjangkau pasar kalurahan dengan sangat mudah. Sedangkan masyarakat yang lebih suka menjual hasil pertanian di pasar Kalurahan Banaran dilandasi oleh alasan terkait harga komoditi. Sebab harga komoditi pertanian di pasar Kalurahan Banaran lebih tinggi ketimbang harga komoditi di pasar Kalurahan Ngléri.

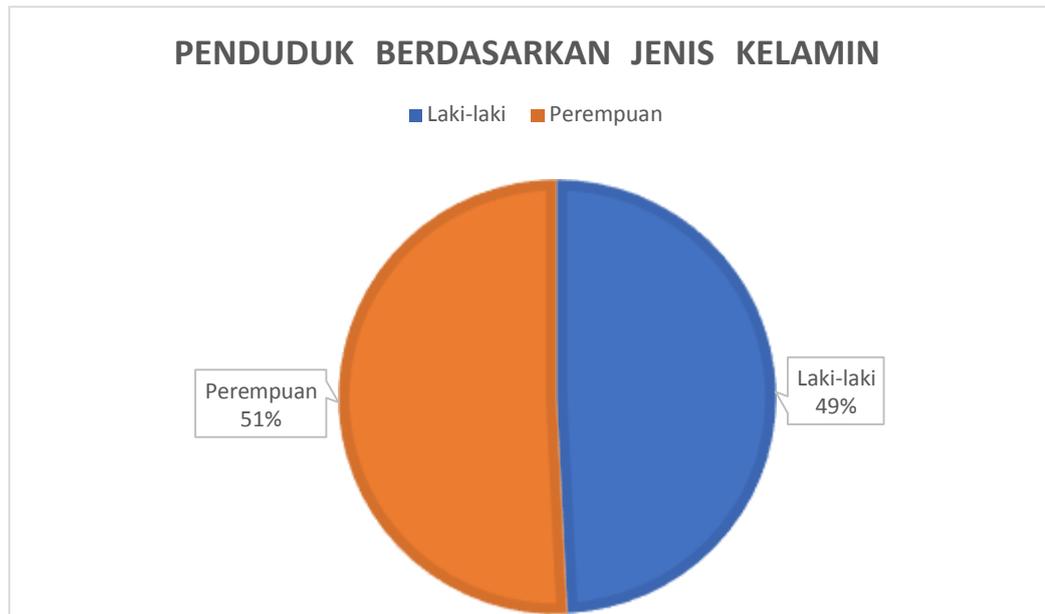
Selain itu, lahan di Kalurahan Ngléri juga digunakan untuk mengembangkan usaha peternakan. Saat ini, jumlah ternak di Kalurahan Ngléri 1.720 ekor. Mayoritas masyarakat Kalurahan Ngléri memelihara ternak kambing dan sapi. Lahan di Kalurahan Ngléri juga digunakan untuk mengembangkan usaha dagang dengan unit usaha warung berjumlah 120 serta industri kecil berjumlah 3 unit.

Sekitar 31,352 Ha dari luas lahan Kalurahan Ngleri merupakan bagian dari tanah kas kalurahan. Tanah kas kalurahan merupakan salah satu aset kalurahan yang disertifikatkan atas nama Pemerintah Kalurahan. Dengan kalimat lain, Tanah kas kalurahan merupakan salah satu kekayaan milik kalurahan. Pengelolaan kekayaan milik kalurahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat kalurahan serta meningkatkan pendapatan kalurahan. Artinya, tanah kas kalurahan bukan hanya berorientasi pada Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal), tetapi terutama untuk kesejahteraan hidup masyarakat.

Tanah kas kalurahan dimanfaatkan untuk pelungguh, pengarem-arem, dan kepentingan umum. Tanah bengkok/pelungguh adalah tanah kalurahan yang diberikan kepada pejabat-pejabat kalurahan sebagai imbalan atas tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai pamong kalurahan. Pelungguh adalah bagian dari tanah kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan pamong kalurahan. Pelungguh diberikan kepada Lurah dan pamong kalurahan selama menduduki jabatan dan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kalurahan setelah masa jabatannya berakhir. Pelungguh dapat digunakan oleh pihak lain untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan mekanisme bangun guna serah atau bangun serah guna. Tanah pengarem-arem adalah tanah kalurahan yang diberikan kepada pamong kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara terhormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya. Setelah meninggal dunia, maka tanah tersebut dikembalikan kepada kalurahan.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kalurahan Ngleri berjumlah 2.891 jiwa yang terdiri dari 937 kepala keluarga (KK). Berikut ini akan disajikan penduduk Kalurahan Ngleri berdasarkan jenis kelamin dan usia produktif.



Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Kalurahan Ngleri didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas perempuan mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas kaum perempuan. Hal ini karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, kaum perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, memperoleh kesempatan kerja, mengakses ruang publik seperti musyawarah kalurahan maupun mengakses kesempatan untuk menjadi Tim Penyusun RKPKal di kalurahan. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan sebagai masyarakat kelas dua cukup kuat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, istri sering disebut sebagai “kanca wingking” (teman di dapur). Ungkapan ini mengartikan bahwa segala nasib dari perempuan tergantung pada suami. Pepatah Jawa lain yang juga sering muncul, yaitu “swarga nunut neraka katut”. Pepatah ini mengandung arti bahwa kebahagiaan maupun penderitaan istri tergantung pada suami. Kebudayaan tersebut sangat mencerminkan minimnya kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan kalurahan. Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pandangan ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara sehingga menjadi kebiasaan.

Dengan keadaan ini, maka skema pembangunan di Kalurahan Ngleri mesti seimbang antara pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) dan pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial atau pembangunan non-fisik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran perempuan agar mampu berdaya dan menjadi pelaku aktif dalam agenda pembangunan yang diselenggarakan oleh Kalurahan Ngleri. Pembangunan sosial bisa diaplikasikan dengan skema pemberdayaan yaitu pemberian kesempatan bagi perempuan untuk mendiskusikan, merumuskan, dan memutuskan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka.

Tabel 2.4 Penduduk Usia Produktif

No	Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-15	411	15, 80
2	15-65	1.894	65, 75
3	65>	582	18, 44
Jumlah		2.891	100

Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Dari tabel data di atas secara kuantitas dapat diketahui bahwa Kalurahan Ngleri mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menopang pembangunan kalurahan. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif (15-65 tahun), maka penduduk usia produktif Kalurahan Ngleri berjumlah 1.894 jiwa atau (65,75%) dari total jumlah penduduk.

3. Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang ataupun keluarga, mata pencaharian pun dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat tingi rendahnya taraf hidup suatu masyarakat dalam hal ini adalah status sosial masyarakat.

Tabel 2.5 Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	867	30,45
2	PNS	51	1,68
3	TNI/POLRI	2	0,03
4	Swasta	87	3,05
5	Wiraswasta/pedagang	211	7,40
6	Tukang	6	0,21
7	Buruh tani	60	2,10
8	Pensiunan	41	1,43
9	Peternak	310	10,91
10	Pengrajin	4	0,14
11	Pekerja seni	2	0,07
12	Lainnya	1.250	42,49
Jumlah		2.891	100

Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

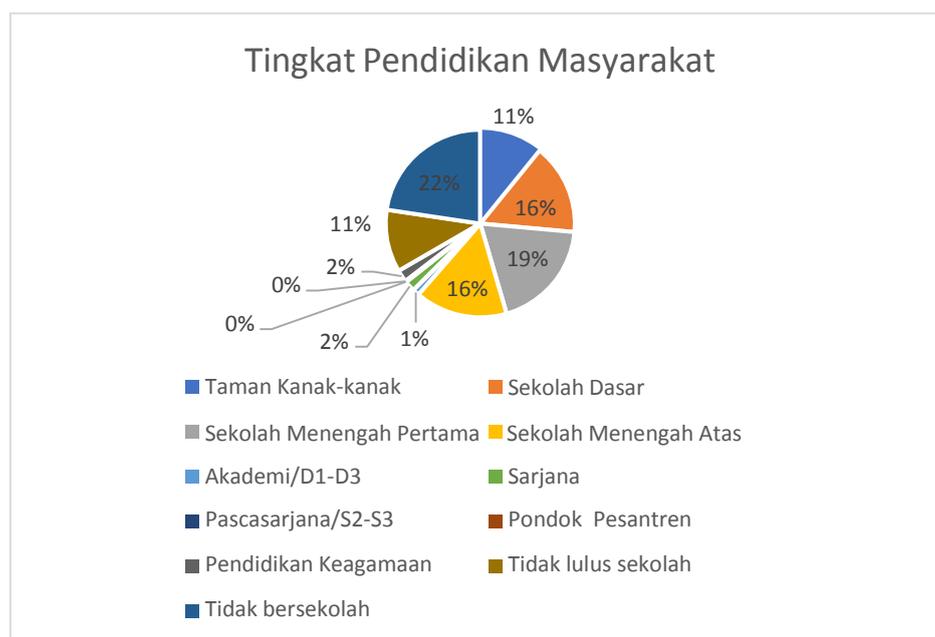
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Ngleri mempunyai mata pencaharian yang beragam. Mayoritas penduduk Kalurahan Ngleri bermata

pencapaian sebagai petani dengan jumlah 867 orang. Hal ini berkorelasi dengan wilayah Kalurahan Ngleri yang didominasi oleh areal pertanian. Dengan keadaan ini, maka sekema pembangunan Kalurahan Ngleri mesti diarahkan untuk pembangunan pertanian terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sektor pertanian.

Mayoritas masyarakat Kalurahan Ngleri menggantungkan hidupnya pada sektor AGRARIS. Mereka bertani dan beternak. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan dasar. Secara umum, masyarakat di Kalurahan Ngleri merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Itulah sebabnya masyarakat Kalurahan Ngleri mencoba mengakses tanah yang dikuasai oleh Perhutani. Masyarakat yang memiliki lahan pribadi tetap mencoba mengakses tanah Perhutani untuk meningkatkan produksi pertaniannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Sedangkan masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai lahan mencoba mengakses tanah Perhutani guna mempertahankan hidup dan keluar dari jerat kemiskinan.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan membantu individu maupun kelompok untuk melakukan transformasi sosial. Selain itu, pendidikan dapat membantu seseorang atau kelompok untuk berpikir kritis dan mampu membaca fenomena di lingkungan masyarakat dengan jernih. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Ngléri.



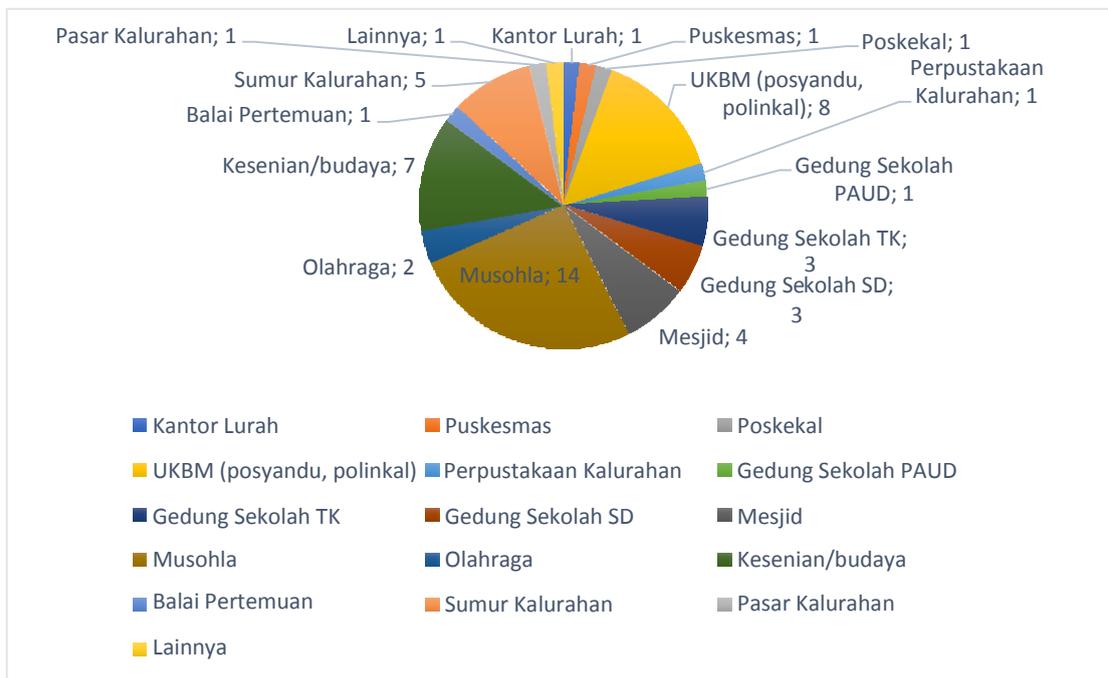
Sumber: Monografi Kalurahan Ngléri Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa sebetulnya, secara kuantitas, sumber daya manusia di Kalurahan Ngléri cukup memadai untuk menyokong pembangunan. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Ngléri masih sangat rendah. Angka Putus Sekolah sebesar 329 orang atau 11% persen, sedangkan yang Tidak Sekolah berjumlah 690 atau 24% persen, sedangkan masyarakat yang dapat menempuh Pendidikan di perguruan tinggi baik akademi/D1-D3 Sarjana

dan Pasca Sarjana/S1-S3 hanya 0,14%-1,92% dari total 2.891 penduduk penduduk Kalurahan Ngleri .

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Seperti prasarana ibadah, prasarana pendidikan, dan prasarana umum lainnya. Berikut adalah Diagram Saranan dan Prasaranan Umum yang berada di kalurahan Ngleri.



Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa prasarana publik di Kalurahan Ngleri cukup memadai untuk menyokong kegiatan masyarakat. Prasarana publik ini digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kalurahan Ngleri. Prasarana publik ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan ekonomi, kegiatan seni, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pendidikan dan lain sebagainya.

C. Struktur Pemerintah Kalurahan Ngleri

Tabel 2.8 Personil Pemerintah Kalurahan Ngleri

No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan Terakhir
1	Supardal	Lurah	L	S1
2	Yuli Suprianto	Carik	L	S1
3	Suardi	Ulu-Ulu	L	SMK
4	Sujarmono	Kamituwa	L	SMK
5	Ahmadi	Danarta	L	SMK
6	Nasib Setya	Tata Laksana	L	SMA
7	Dwi Yuswanto	Pangirpta	L	SMK
8	Budi Arwibowo	Staff	L	SMK
9	Fitrinur Yusuf	Staff	L	SMK
10	Agus Purwanto	Staff	L	SMK
11	Septiana N. Musito	Staff	P	SMK
12	Marya Ulfa	Staff	P	SMK
13	Istri Rahayu	Dukuh Ngloweng	P	SMK
14	Edy Sumarno	Dukuh Puntuk Kulon	L	SMK
15	Sukiyanto	Dukuh Puntuk Wetan	L	SMK
16	Partini	Dukuh Ngleri Kulon	P	SMK
17	Sunarko	Dukuh Ngleri Wetan	L	SMK
18	Endri Pratiwi	Dukuh Ngleri Lor	P	SMK
19	Tawikan	Dukuh Wonolagi	L	SMK
20	Danang Sumanta	Dukuh Jelok	L	SMK

Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Ngleri didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 5:15. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah perempuan dan laki-laki dalam struktur Pemerintah Kalurahan Ngleri belum seimbang. Dari 5 orang perempuan yang menjadi bagian dari struktur Pemerintah Kalurahan Ngleri, hanya 2 orang yang menjabat sebagai Staf pamong kalurahan. Sedangkan 3 orang perempuan menjabat

sebagai Dukuh. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kalurahan Ngleri sudah mulai menekankan inklusifitas dalam perekrutan perangkat kalurahan. Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan Ngleri mesti terus memberi kesempatan yang sama kepada kaum perempuan agar beroperasi di ranah publik dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi perangkat kalurahan.

1. Tugas dan Fungsi Kepala Lurah

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Ngleri dipimpin oleh Bapak Supardal. Sebagai Lurah, Bapak Supardal bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan.

Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Bapak Supardal mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Bapak Supardal meliputi, pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna. Selain itu, sebagai Kepala Pemerintahan di Kalurahan Ngleri, Bapak Supardal juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Carik

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Ngleri. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Ngleri. Saat ini, Carik Kalurahan Ngleri dijabat oleh Bapak Yuli Suprianto. Sebagai Carik, Bapak Yuli Suprianto bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan ketatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

Berdasarkan pengamatan selama melakukan praktikum di Kalurahan Ngleri, diketahui bahwa tugas Carik adalah sebagai berikut: Pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. Keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Tata Laksana

Kaur Tata Laksana Kalurahan Ngleri diemban oleh Bapak Nasib Setya. Sebagai Kaur Tata Laksana, Bapak Nasib Setya mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Kaur Tata Laksana bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4. Tugas dan Fungsi Danarta

Danarta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarta Kalurahan Ngleri dijabat oleh Bapak Ahmadi. Sebagai Danarta, Bapak Ahmadi bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

5. Tugas dan Fungsi Pangripta

Pangripta berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Pangripta Kalurahan Ngleri dijabat oleh Bapak Dwi Yuswanto. Sebagai Pangripta, Bapak Dwi Yuswanto bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

6. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Ngleri dijabat oleh Bapak Suwardi. Sebagai Ulu-Ulu, Bapak Suwardi bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

7. Tugas dan Fungsi Kamituwa

Kamituwa berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwa Kalurahan Ngleri dijabat oleh Bapak Sujarmono. Sebagai Kamituwa, Bapak Sujarmono bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

8. Tugas dan Fungsi Dukuh (Pelaksana Kewilayahan)

Kalurahan Ngleri terdiri dari 8 Padukuhan (dusun), yaitu: Padukuhan Ngloweng, Padukuhan Puntuk Kulon, Padukuhan Puntuk Wetan, Padukuhan Ngleri Kulon, Padukuhan Ngleri Wetan, Padukuhan Ngleri Lor, Padukuhan Wonolagi, dan Padukuhan Jelok. Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas perwilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: Pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ketiga, Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam

menjaga lingkungannya. Keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

D. Data Personil BPKal

Tabel 2.9 Personil BPKal

No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan
1.	Drs. H.Tamam Hasyim	Ketua	L	SLTA
2.	Muhsiyn	Wakil ketua	L	SLTA
3.	Reny Rahmawati, S.Si	Sekretaris	P	SI
4.	Bagong Kriswanto, S.Pd	Kabid Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	L	SI
5.	Widiyanto	Kabid Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	L	SLTA
6.	Sugiyanto	Anggota	L	SMA
7.	Suroto	Anggota	L	SLTA

Sumber: Monografi Kalurahan Ngleri Tahun 2022

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPKal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BPKal merupakan unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan bersama pemerintah kalurahan. Itu berarti bahwa BPKal ikut mengatur dan mengambil keputusan kalurahan. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPKal relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPKal dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPKal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus kalurahan. BPKal juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat kalurahan; melakukan pengawasan kinerja Lurah serta menyelenggarakan musyawarah kalurahan. Ini berarti bahwa eksklusi BPKal dan pelemahan fungsi hukum BPKal digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah. Sedangkan fungsi politik BPKal terdiri dari: Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua, melakukan pengawasan kinerja Lurah. Ketiga, menyelenggarakan musyawarah kalurahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data lapangan baik yang diperoleh melalui responden dalam penelitian maupun terhadap penelaahan dokumen, maka dalam bab terakhir dari skripsi ini ada hal yang akan peneliti kemukakan yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan maka dapat digambarkan bahwa Peran Pemerintah Kalurahan dan Organisasi AGRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertanian Kalurahan Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul disimpulkan sebagai berikut:

Peran pemerintah Kalurahan dan organisasi tani dalam pelaksana program untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat sektor pertanian sudah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan namun sejauh ini masih berdasarkan pada pembangunan SDM melali pelatihan dll. Dengan demikian Dari keseluruhan hasil analisis di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Sebagian besar tanah di Kalurahan Ngleri dimiliki oleh Perhutani. Selain itu, sebagian tanah lain di Kalurahan Ngleri merupakan bagian dari tanah kas kalurahan, tanah pelungguh, dan tanah pengarem-arem. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mempunyai tanah pribadi, sedangkan Sebagian besar Masyarakat Kalurahan Ngleri memperoleh akses terhadap tanah milik Perhutani, tanah pelungguh, dan tanah pengarem-arem. Perhutani memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah untuk menanam tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah dan masyarakat yang memanfaatkan tanah Perhutani berkewajiban untuk merawat tanaman jati serta minyak kayu putih yang telah ditanam oleh pihak Perhutani tanpa diberikan hak

mengelola tanah dengan tujuan membangun sarana irigasi sehingga masyarakat sektor pertanian ngleri hanya mengandalkan alam/musim. Sementara itu, tanah pelungguh hanya dapat diakses oleh para penduduk Lurah. Dengan demikian, tidak semua masyarakat mempunyai akses terhadap tanah pelungguh.

2. Sejauh ini ada berbagai upaya untuk melakukan redistribusi fasilitas pertanian. Pemerintah Kalurahan Ngleri mencoba membangun sumur bor di areal persawahan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pertanian menyelenggarakan penyuluhan petani dan pembagian bibit/benih tanaman. Meskipun demikian, sumur bor yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Ngleri belum memadai untuk menyokong pembangunan pertanian di Kalurahan Ngleri. Hal ini terjadi karena hanya pemilik atau pengelola lahan yang berada di dekat sumur bor saja yang mampu mengakses air dari sumur bor tersebut. Akibatnya, masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk mulai menanam tanaman. Di sisi yang lain, penyuluhan pertanian dan pembagian bibit/benih belum memadai untuk menyokong pembangunan pertanian. Hal ini terjadi karena distribusi bibit/benih atau pupuk dilakukan melalui kelompok-kelompok tertentu dengan jumlah yang tidak memadai sehingga tak jarang terjadi praktik kapitalisasi bibit.
3. Kendala utama yang dihadapi oleh para petani dalam mengakses tanah adalah terkait sewa lahan. Sebagian petani merasa bahwa biaya sewa tanah kas kalurahan, tanah pelungguh, dan tanah pengarem-arem terlampau mahal. Itulah sebabnya masyarakat lebih suka memanfaatkan atau mengelola lahan yang dikuasai oleh Perhutani dengan kualitas tanah dan akses terhadap air tergantung pada alam/cuaca.

4. Organisasi tani yang seharusnya dapat menjadi wadah menyalurkan kepentingan petani dalam kasus Ngléri kurang responsive menyampaikan keluhan Bersama tentang masalah-masalah pertanian. Alhasil sewa tanah yang mahal hanya menjadi fakta permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Sehingga masalah turunannya adalah program pemberdayaan masyarakat petani Ngléri hanya sebatas pada pelatihan yang berulang-ulang namun tidak optimal menyelesaikan masalah pertanian.
5. Demikian pula dengan Pemerintah Kalurahan pun kurang responsive, sehingga sinergitas antara dua kepentingan baik Pemerintah Kalurahan dan Organisasi Tani seperti AGRA kurang memiliki titik temu yang dapat menyatukan. Padahal responsive ini begitu penting sebagai bagian dari koordinasi yang akan membangun komunikasi berkelanjutan dan akan menjadi titik temu bersinergi menuju kepada kepentingan Bersama

Hasil wawancara dan dokumentasi analisis dan penarikan kesimpulan model pemberdayaan masyarakat sector pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dan dinas pertanian kepada organisasi tani yang didalamnya terhimpun masyarakat sector pertanian ini akan dilanjutkan pada saran peneliti berikut:

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait pada akhir penelitian ini adalah:

1. Ada baiknya pemerintah Kalurahan Ngléri perlu mengoptimalkan anggaran Kalurahan untuk penambahan jumlah sumur bor, menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan fundamental masyarakat sector pertanian yaitu mengoptimalkan penggunaan tanah dengan cara Acces reform pada konteks ini dititikberatkan pada pemberian kesempatan yang

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan pengadaan akses petani terhadap air sumur bor.

2. Sebaiknya, Pemerintah kalurahan ngleri kiranya dapat mengadakan musyawarah Bersama beberapa kelompok tani baik untuk menjalin silaturahmi, dan dapat pula mengandeng untuk pembentukan Koperasi Tani bekerjasama dengan pihak kolompok tani yang secara keangotaan terdiri dari petani kecil lapis bawah agar supaya permodalan internal organisasi dapat berputar dan menghasilkan keuntungan Bersama. Atau mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan yaitu kolektifisasi lahan pertanian, di garap Bersama sehingga hasil produksi pertanian dapat dinikmati keuntungan Bersama-sama.
3. Pemerintah Kalurahan Ngleri diharapkan dapat menjadikan reforma agraria sebagai bagian dari kebijakan pemerintah kalurahan yang berpihak kepada masyarakat sektor pertanian. Karena reforma agraria dapat dilakukan dengan cara redistribusi aset dan akses kepada petani sehingga petani sungguh-sungguh mengembangkan potensi pertanian di Kalurahan Ngleri. Karena reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah saja, tetapi juga pembenahan ekonomi masyarakat melalui kredit usaha tani yang kiranya dapat dimotori Bersama antara pemerintah kalurahan, dinas pertnain, organisasi tani.
4. Pemerintah kalurahan kiranya dapat bertindak lebih Proaktif untuk mengidentifikasi problem, kebutuhan, dan potensinya untuk dapat merumuskan gagasan pemecahan masalah, dan pengembangan potensi secara sistematis
5. Ada baiknya, Organisasi Tani AGRA dapat melakukan penataan organisasi kembali untuk menentukan pokok-pokok pikiran tentang agraria dan mengambil langkah yang tepat guna dapat mengatasi permasalahan mendasar yang ada pada masyarakat sector pertanian Ngleri yaitu akses terhadap unsur-unsur agrarian untuk

kepentingan Bersama pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat tani yang mandiri.

6. Kiranya, Organisasi Tani AGRA dapat berbenah dengan menerapkan model organisasi moderen yang memiliki anggaran dasar anggaran rumahtangga, struktur kepengurusan, rencana kerja, serta manajemen organisasi berdasarkan pada analisa situasi objektif pertanian. Dapat berjejaring berhimpun berserikat dengan luas agar supaya kiranya ide, gagasan dan pengalaman praktik terus ditingkatkan dapat menghimpun barisan nasional petani untuk menuntut percepatan legislasi aset dan redistribusi aset di wilayah-wilayah Kalurahan yang secara struktur relasi kepemilikan dan penguasa atas tanah masih didominasi oleh segelintir orang.

LAMPIRAN

Dokumentasi & Wawancara



Nama : Supardal
Profesi : Lurah Ngléri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : S1



Nama : Yuli Suprianto
Profesi : Carik Ngléri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : S1



Nama : Suwardi
Profesi : Ulu-Ulu Ngléri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMK



Nama : Mohasym
Profesi : Wakil BPKal Ngléri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMK



Nama : Endri Pratiwi
Jabatan : Dukuh Ngleri Lor
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMK



Nama : 1. Nofi (baju biru)
Profesi : Petani
2. Tiwi (baju kuning)
Profesi : Buruh tani
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD & SMP



Nama : Mariati
Profesi : Ketua Kelompok Tani Agra
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD



Nama : Asmadi
Profesi : Ketua Gapoktan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMK



Nama : Adi Sumarto
Profesi : Petani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA



Nama : Mohaidin
Profesi : Petani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMK
Catata : Bukan Informan, (Suami Ibu Mariati)

Tabungan & Sumber Pemasukan Sampingan



Ternak sapi sebagai tabungan milik masyarakat. Biasanya sapi akan dijual Ketika ada kebutuhan mendesak saja.



Arang Kayu, sebagai pemasukan sampingan petani. Dihargakan 6.000,00 (enam ribu rupiah) per satu katong kresek kecil. Dan 70.000,00 (tuju puluh ribu rupiah) per karung.



Karung berisikan kacang kedelai & gabah padi sisa hasil panen musim kemarin. Biasanya petani akan mengiling padi ketika stok beras mulai menipis. Yang berwarna kuning adalah mesin perontok padi.

PANDUAN WAWANCARA

SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN ORGANISASI AGRA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI

Di Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen Kabupaten Gunung Kidul, DIY.

Nama :

Tempat Lahir :

Jenis Kelamin :

Profesi :

Pendidikan :

Umur :

DAFTAR PERTANYAAN

Pemerintah Kalurahan

1. Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan, apakah masyarakat yang berprofesi sebagai petani serta permasalahannya sudah diadakan program khusus?
2. ABapakah pemerintah Kalurahan Ngleri melihat sektor pertanian sebagai sumber mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai hal yang potensial di kembangkan?
3. Adakah alokasi anggaran khusus untuk proteksi pemberdayaan masyarakat sektor pertanian? Atau mengatasi masalah akses terhadap sumber daya alam (tanah dll)?
4. Bagaimana permasalahan akses masyarakat terhadap sarana-prasaran pertanian dapat di atasi oleh pemerintah Kalurahan?
5. Sejauh ini bagaimana sinergitas pemerintah Kalurahan dengan masyarakat sektor pertanian dalam hal ini Gapoktan untuk menjawab masalah yang di alami oleh petani Ngleri?
6. Bagaimana antusiasme serta keaktifan masyarakat dalam musyawarah Kalurahan?

Organisasi Tani AGRA

1. Bagaimana Gapoktan mewadahi petani khususnya untuk pelatihan atau program kerja pemberdayaan sebagainya?
2. Apakah Gapoktan pernah menerima bantuan dari kementerian pertanian atau dari pihak lain?
3. Apakah ada program-program Gapoktan, seperti rapat musyawarah, berapa minggu sekali dilakukan atau waktunya kapan? Serta hubungan antara Gapoktan dengan pemerintah Kalurahan untuk program strategis pemberdayaan seperti apa?
4. Apakah ada kendala Gapoktan dalam mengorganisasikan para petani?

Masyarakat Sektor Pertanian

1. Selama Bapak/Ibu menjadi petani, adakah permasalahan yang di alami?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembangunan pertanian sangat penting untuk dilakukan di Kalurahan Ngléri?
3. Menurut Bapak/Ibu Jika ada hambatan dalam pertanian bagaimana menyelesaikannya?
4. Apakah Bapak/Ibu ikut terlibat dalam musrembang, muskal, dan Musdus?
5. Setahu Bapak/Ibu, apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ngléri terhadap para petani, sesuai harapan kah?
6. Setahu Bapak/Ibu, apa saja upaya yang dilakukan oleh AGRA & Pemerintah Kalurahan Ngléri dalam memproteksi tanah masyarakat maupun tanah kas kalurahan?
7. Setahu Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme kebijakan itu dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Ngléri?
8. Dalam bertani, Berapa luasan lahan yang dapat diakses oleh Bapak/Ibu dan petani yang lain?
9. Bagaimana Bapak/ibu memperoleh akses atas tanah? Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan sendiri? Ataukah Bapak Ibu menyewa tanah orang lain atau tanah kas Kalurahan?

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Helmi dkk, 2018. *Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. Journal of Applied Agricultural Science and Technology 2(2): 1-10 (2018). <https://media.neliti.com/media/publications/277329-pengembangan-kapasitas-petani-dan-kelemb-2cd5577b.pdf>
- Alter Maykel Ruru dkk 2017. Peran Pemerintah Dalurahan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. VOL. 6 No. 95 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/30545>
- K Kushandajani 2017. Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2017 - Ejournal2.Undip.Ac.Id.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1635>
- K Khaerunnisa 2019. Peran Bpd Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. - Jurnal Al-Dustur, 2019 - Mail.Jurnal.Iain- Bone.Ac.Id.
<https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/356>
- K Kushadajani, Ia Permana 2020. Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal Dalam Perspektif Relasi Antar Aktor.
- Jiip J. Ilm. Ilmu ..., 2020 - Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/7318>

Buku :

Anwas, Adiwilaga. 1992. Pengantar Ilmu Pertanian. Jakarta: Rineka Cipta.

Ambarwati, Aprilia, Ricky Adrian Harahap, Isono Sadoko dan Ben White. 2016. *Land Tenure and Agrarian Structure in Regions of Small-Scale Food Production*. Dalam Robinson Kathryn dan John McCarthy (eds.) *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. Singapura: ISEAS Press.

Ambarwati, Aprilia. 2017. *Ketimpangan Akses Tanah di Pedesaan*, dalam Anang Zakaria (Ed.). 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute Research and Empowerment.

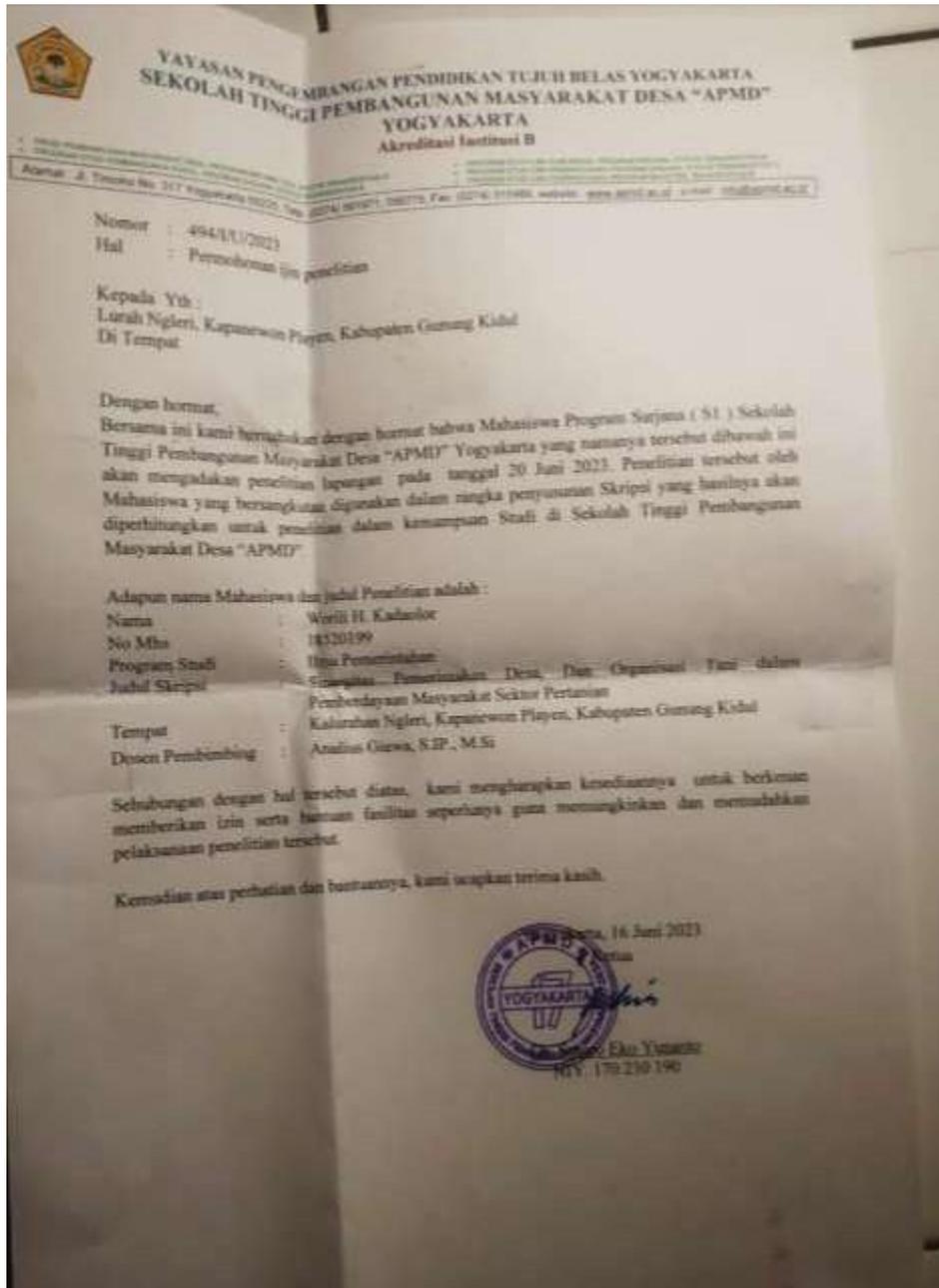
Arikuntoro, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.

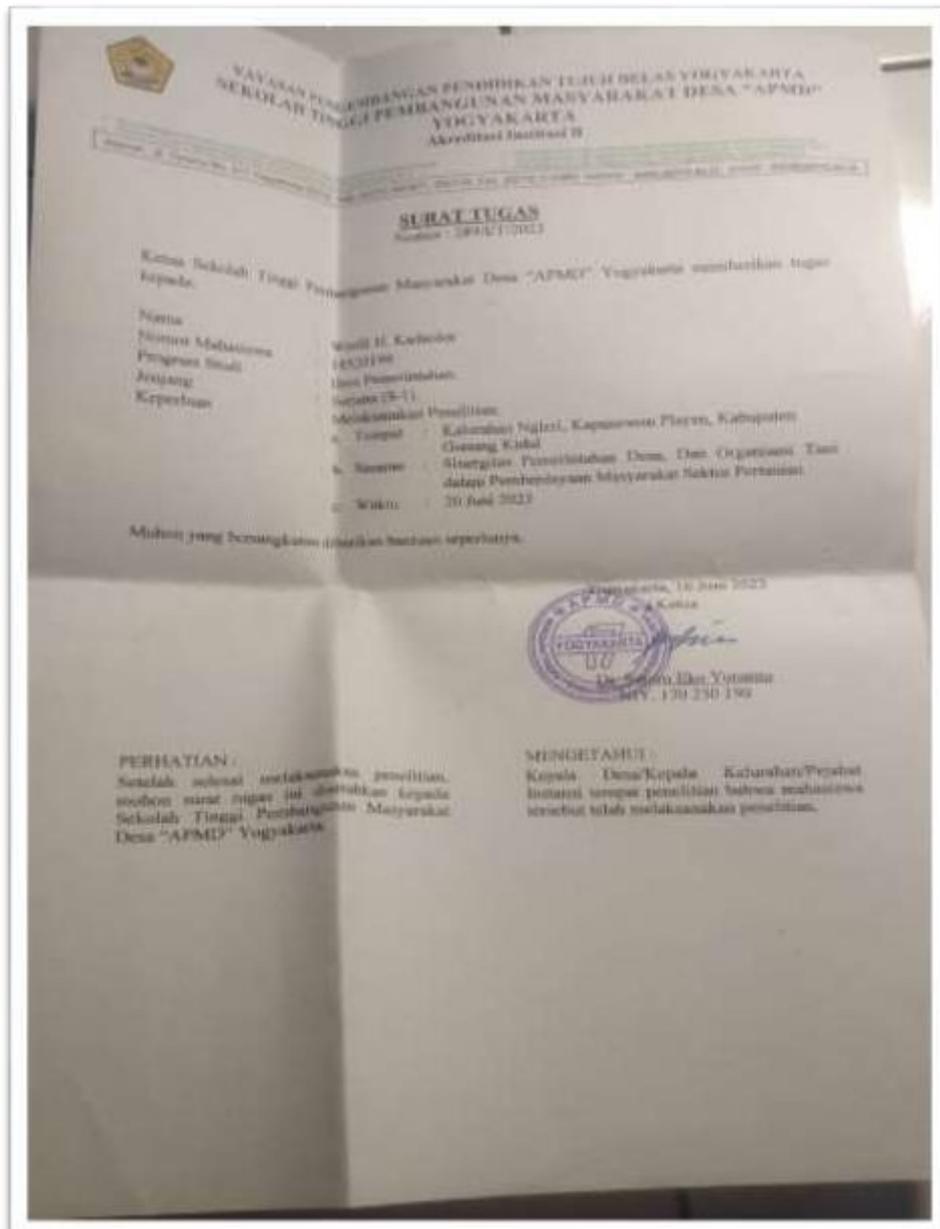
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UIP.

Moleong, Lexi. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.

LAMPIRAN



Dilampirkan Gambar 1.1 Surat Permohonan Ijin Penelitian



Dilampirkan Gambar 1.2 Surat Tugas Penelitian



Lumbung Desa STPM "APMD"
Perpustakaan Desa Tugu Pendidikan Kecamatan Wafu 3 Tawak 111 Kecamatan Tigapuluh 2022
Email: gprasetyo@proton.me no. 085 911 100 1277

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

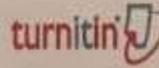
Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPM "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: WORILI H. KADAOLOR

Judul makalah: SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN ORGANISASI TANI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR PERTANIAN

Tanggal pemeriksaan: 31 Juli 2023

Persentase plagiasi: 25%

Perugas:  Checked By:
Bagus Prasetyo 

Dilampirkan Gambar 1.3 Surat Tada Terima Cek Plagiasi